

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF  
TRANSFER TUNAI MELALUI BANK**

**(Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli,  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**SITI ZAINIAH AVIVAH**

**NPM :1521030428**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF  
TRANSFER TUNAI MELALUI BANK  
(Studi di BRILink Desa Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli,  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum  
Pembimbing II : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK**

**(Study di BRILink Desa Sido Rahayu, Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara)**

## **ABSTRAK**

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga dapat dengan mudah melakukan pekerjaan seperti menjadi agen BRILink. Menjadi agen BRILink adalah melayani transaksi keuangan layaknya kantor Bank pada umumnya, tetapi bedanya dalam usaha ini agen tidak perlu memiliki kantor, usaha ini bisa dikerjakan dirumah.

Transaksi yang dilakukan beberapa agen BRILink ini menimbulkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink? Dan bagaimanakah penetapan tarif yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah?

Objek penelitian ini adalah agen BRILink yang menangani usaha layanan BRILink. Penelitian ini menggunakan teknik normatif empiris. Penelitian ini mengkaji norma dan hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dan juga penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap agen BRILink dan para nasabah agen BRILink. Pengamatan dilaksanakan terhadap alat yang digunakan pada transaksi dan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tersebut.

Hasil penelitian di agen BRILink Desa Sido Rahayu bahwa transaksi yang dilakukan antara Bank BRI dengan agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya diperbolehkan dan sah karena telah sejalan dengan hukum Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarampe Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

**Nama : SITI ZAINIAH AVIVAH**

**NPM : 1521030428**

**Program Studi : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG**

**PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI**

**BANK (Studi BRILink Desa Sido Rahayu Kecamatan**

**Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**NIP. 1970005022000032001**

**Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I**

**NIP. 195411131985031001**

**Ketua Jurusan Muamalah,**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN  
TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (Studi BRILink Desa Sido  
Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)** Disusun  
oleh: **SITI ZAINIAH AVIVAH, NPM: 1521030428**, Program Studi:  
**Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN  
Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal : **17 Oktober 2019**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.

Sekretaris Sidang

Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji Pendamping I

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji Pendamping II

Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I



**Dekan  
Fakultas Syariah**

**Dr. H. Hainairuddin, M.H.**  
**NPM. 196210221993031002**



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.*

*Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”*

(Q.S Al-Maaidah (5): 2)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Surat Al-Maidah), Bandung: Diponegoro: 2005) h. 106

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ibunda tercinta Maryatun dan Ayahanda tercinta Sutrisno, atas segala pengorbanan , senantiasa mendoakan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti ananda dapat membanggakan untuk kalian dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kalian dunia dan akhirat.
3. Kakakku tersayang Ely Tridia Ningsih, Abangku tersayang Sundoyo, dan Adikku tersayang Ahmad Sodik atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Siti Zainiah Avivah, dilahirkan di Sido Rahayu pada tanggal 31 maret 1997, anak ketiga dari pasangan Sutrisno dan Maryatun. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar 01 Sido Rahayu dan selesai pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama PGRI 03 Abung Selatan selesai pada tahun 2011, Madrasah Aliyah Plus Walisongo selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra kampus UKM Fotografi Blitz UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 23 September 2019

Yang Membuat,

Siti Zainiah Avivah

NPM: 1521030428



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya diakhir zaman, amiiin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, judul yang disusun yaitu **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI”** (Study di BRILink Desa Sido Rahayu Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara)

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah
3. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, dan Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat
5. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah membantu berupa buku untuk penulisan skripsi.
6. Agen BRILink Desa Sido Rahayu yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian skripsi.
7. Teman seperjuanganku Binti Masitoh S.H yang telah menemani dari awal hingga akhir skripsi ini.
8. Teman seperjuangan kuliah Endang Supriyani S.H dan Devi Novegasari S.H, atas dukungan dan semangatnya selama ini.
9. Teman seperjuangan organisasi Resky Mertarega Saputri S.H dan Yolanda Rosa S.Sos, atas dukungan dan semangatnya selama ini
10. Teman-teman kosan yunia putri, Kusuma Retno Sumekar S.E, Iin Martati Nova S.pd, Sinta Suci Parastika S.Pd, Novitaria Ulandari S.pd, Apriani Wulandari S.pd, Rifki Erdayanti S.Sos, atas dukungan dan semangatnya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah G dan Muamalah H, atas dukungan dan semangatnya selama ini.
12. Teman-teman kontrakan semester akhir, Heni Rotari S.Pd, Gusti Ayu Jamilatul Akro S.H, Nurul Hidayati S.H, atas dukungan dan semangatnya selama ini.
13. Teman-teman KKN 49 Desa Mekar Jaya, teman-teman PPS P.A Metro, dan teman-teman Kompre, yang telah membantu melancarkan rangkaian proses skripsi ini.



Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 23 September 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Populasi dan Sample .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Pengolahan Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perbankan dalam Islam .....	17
B. Produk Perbankan Islam .....	22
C. Hukum Islam tentang Ujrah, Muamallah, dan Riba .....	29
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).....	63



### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Sejarah Bank BRI.....	71
B. Sejarah Terbentuknya BRILink .....	76
C. Konsep BRILink .....	79
D. BRILink di Desa Sido Rahayu .....	88

### **BAB IV HASIL ANALISIS DATA**

A. Penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah. ....	93
B. Hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink .....	93
C. Penetapan tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah .....	94

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	99

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara)”** . Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini. Adapun penjelasan judul adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>1</sup>
2. Hukum/Hukum Islam menurut Ismail Muhammad Syah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat islam<sup>2</sup>. Menurut Muhammad Daud Ali hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam<sup>3</sup>. Menurut Said Aqil Husin, Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun al-sunah untuk mengatur

---

<sup>1</sup>Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011),h.58

<sup>2</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga (Jakarta: Bumi Askara, Jakarta, 1999), h.17

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 42



kehidupan manusia yang bersifat universal- relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Alaidin Kato, hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui mengikat untuk semua orang yang beragama islam<sup>5</sup>

3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya): penetapan bahasa indonesia menjadi bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928.<sup>6</sup>
4. Tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara.<sup>7</sup>
5. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendeбет cabang lain mengkredit.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Said Aqil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), h.6.

<sup>5</sup>Alaidin Kato, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.26.

<sup>6</sup><https://www.apaarti.com/penetapan.html>

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif>

<sup>8</sup><https://pandusamamaya.wordpress.com/pengertian-transferkeuntungan-transaksi-transfer-mekanisme-dan-prosedur-transfer-serta-biaya-transaksi-transfer/>

6. Tunai/Cash adalah pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli atau jasa.<sup>9</sup>
7. BRILink adalah layanan laku pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Agent BRILink adalah pihak masyarakat yang sudah menjadi nasabah BRI yang bersedia bekerja sama dengan Bank BRI melakukan transaksi perbankan.<sup>10</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (BRILink Studi di Desa Sidorahayu, Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara) adalah suatu kajian tentang penelitian terhadap suatu peristiwa mengenai sistem penetapan tarif transfer tunai melalui layanan laku pandai BRILink. Yaitu Hukum Islam terhadap penetapan yang diberikan Bank BRI kepada agen BRILink dan penetapan yang diberikan BRILink kepada nasabah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Adanya ketidakpastian hukum islam yang ada di Indonesia, yakni mengenai biaya yang dikeluarkan ketika melakukan transaksi transfer tunai melalui BRILink, dan bagaimana akad yang terjadi dalam

---

<sup>9</sup><https://rairakamotorsukabumi.wordpress.com/2016/10/11/pengertian-pembayaran-tunai-dan-pembayaran-kredit/>

<sup>10</sup><https://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27/apa-itu-brilink-dan-agen-brilink/>

transaksi tersebut. Serta Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta penetapan tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

## 2. Alasan Subjektif

Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yakni jurusan Muamalah.

## C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>11</sup>

*Mu'amalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>12</sup> Dengan demikian manusia harus saling tolong-

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 7.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogyakarta: UII Press, 2000), hal 11



menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*.

Seperti firman Allah SWT dalam surah al - Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2) <sup>13</sup>

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang, Tiki maupun Kantor Pos tidak akan mendapatkan jasa pengirim barang dan BRILink tidak mendapat jasa dari pengiriman uang dari masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Empat hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling membutuhkan satu sama lain.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,2005) h.106

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *ujrah*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos.

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:



أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

*mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf: 32)<sup>14</sup>*

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut “dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.

Memasuki era digitalisasi, layanan jasa perbankan berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan *customer* yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Jasa perbankan yang dimaksud tersebut adalah suatu kegiatan yang bersifat tak teraba (*intangible*), dimana pemenuhan kebutuhan tidak lagi terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti hal yang di BANK Umum, jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h.491



dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut BRILink. BRILink adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap *merchants* (toko/swalayan mitra BRI).

Agen BRILink merupakan layanan agen laku pandai milik Bank BRI. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Berdasarkan [agenbrilink.wordpress.com](https://agenbrilink.wordpress.com) tentang biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu transfer sesama BRI RP. 3.000,00 Transfer antar Bank RP. 15.000,00 Setor pasti RP. 3.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp. 3.000,00 jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu ini ATM sedangkan pada menu tunai tidak dikenakan biaya.<sup>15</sup> Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen BRILink sebesar

---

<sup>15</sup> <https://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27>

Rp 10.000, sebagai contoh nasabah ingin mengambil uang Rp. 500.000,00 di BRILink maka akan menerima uang sebesar Rp. 487.000,00 dan jika nasabah ingin mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 maka nasabah harus membayar Rp.513.000 jika dilakukan sesama BRI.

Berdasarkan survey beberapa nasabah pengguna BRILink di kecamatan Abung Semuli bahwa agen BRILink memasang upah biaya transfer Rp. 15.000,00 sedangkan di BRILINK kecamatan way pengubuan bahwa agen BRILink memasang upah biaya tarik tunai Rp.18.000,00, upah biaya belum ditambah biaya transfer dan lainnya.

Uraian di atas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas yakni mengenai

---

<sup>16</sup> H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88.

**“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara).**

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink ?
3. Bagaimana penetapan tarif yang diambil Agen BRILink terhadap nasabah?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink
3. penetapan tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :



### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang akad transaksi penetapan tarif transfer tunai melalui Brilink
- b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Muamalah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan, dengan mengkaji data primer.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>17</sup> Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang penulis pegunakan adalah Hukum Perdata Islam, Al-Qur'an, Hadist. Dalam penelitian ini sumber primer adalah :

- a) Direktur Bank BRI
- b) Agen BRILink
- c) Nasabah pengguna BRILink

---

<sup>17</sup>Kaelan , M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), H. 58.

<sup>18</sup>Ibid., H. 68

<sup>19</sup>Susiadi AS, *Metodelogi penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), h.65.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum skunder penulis peroleh dari refensi buku-buku, atau tulisan yang berkaitan dengan analisa ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari buku-buku penunjang seperti ensiklopedia Islam dan kamus.

4. Tempat Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidorahayu yang berjumlah 6 Agen BRILink

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti.<sup>21</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjek kurang dari seratus lebih

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) h.173

<sup>21</sup>Ibid .,h.174



baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>22</sup> Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian itu yaitu :

1. Agen BRILink di Desa Sido Rahayu Kec. Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
2. Nasabah pengguna BRILink / Masyarakat Desa Sido Rahayu Kec. Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 2 Agen BRILink dan 10 Kepala Keluarga sebagai Nasabah pengguna BRILink yaitu sekaligus pelaku dalam melakukan transaksi tarik transfer tunai melalui BRILink.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi, dokumen yang dimaksud yaitu

---

<sup>22</sup> Ibid., h.183

<sup>23</sup> Ibid, h.236

tentang penerapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c) Buku-buku atau literatur yang sesuai dengan penelitian.

6. Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan pemeriksaan ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>24</sup>
- b. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Susiadi AS, *Metodelogi penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014) h.122

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

- c. Sistematis data (*systemslizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Dilakukan dengan mengumpulkan data tentang penerapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta tarif/jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah disertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang terjadi di lapangan dalam penerapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perbankan dalam Islam**

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financialintermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>26</sup>

Perbankan Islam semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Ushul Fiqh kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa “*maa lana yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*” yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan, dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan wajib dilakukan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dan Perbankan menjadi jelas.

---

<sup>26</sup>Lihat devisa bank pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan



Secara umum bank adalah yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian. Masalah ekonomi/perbankan ini termasuk kedalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad SAW., tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci kedalam masalah ini. Al-Quran dan Sunnah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi.

### 1. Sejarah Perbankan Syariah

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>27</sup>

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa

---

<sup>27</sup>Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2004) hlm.18

pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khatab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di *Baitul Mal* yang ketika itu siimpor dari mesir. Disamping itu pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan Anshar.<sup>28</sup>

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat dipakistan dan malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Namun demikian sejarah perbankan syariah pertama kali berlangsung di Kairo, Mesir dengan didirikannya *Islamic Rular Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963.<sup>29</sup>

Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, serta pada tahun yang sama di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.<sup>30</sup>

Di Indonesia secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic*

---

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 19

<sup>29</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) hlm.21

<sup>30</sup>Ibid, hlm.22

*window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.<sup>31</sup>

Ditahun 2008 pemerintahan Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 Undang-Undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Beberapa ilmuwan dan para cendekiawan muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut:<sup>33</sup>

Didalam bukunya yang berjudul "*Handbook of Islamic Banking*" kazarian menuturkan bahwa tujuan dasar dari perbankan syariah adalah

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 27

<sup>32</sup>Ibid, hlm.30

<sup>33</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group:2014) hlm.

menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrument keuangan (*finansial instrumen*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberi keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.

M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul "*Thowards a Just Monetary System*" mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada suatu pembiayaan bank. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan syariah juga jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 3 UU No.12 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## B. Produk Perbankan Islam

Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat produk, yaitu:<sup>35</sup>

### 1. Produk Pendanaan

#### a. Pendanaan dengan Prinsip *Wadi'ah*

##### 1) *Giro Wadi'ah*

*Giro wadi'ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.<sup>36</sup> Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan dimuka. Beberapa fasilitas giro wadi'ah yang disediakan bank untuk

---

<sup>35</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo:2008) hlm. 112

<sup>36</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) hlm. 81



nasabah yaitu, buku cek, bilyet giro, kartu ATM, dan fasilitas pembayaran lain.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا....﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya..” (Q.S An-Nissa: 58)<sup>37</sup>

## 2) Tabungan Wadiah

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah* tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Skema tabungan *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah dhamanah*, pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang/aset yang dititipkan adalah uang.

Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak berentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2005) hlm.87

dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>38</sup>

b. Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang.<sup>39</sup> Giro dan tabungan *qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadiah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank memberikan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar daripada giro *qardh* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif. Bentuk simpanan *qardh* seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah. Hanya bank syariah di Iran yang menggunakannya.

c. Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

1) Tabungan *Mudharabah*

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uang nya kepada bank sebagai penguasa (*mudharib*) untuk

---

<sup>38</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) Hlm. 88

<sup>39</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada : 2004) h. 106

diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ... ﴿١٠﴾

“ Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (Q.S Al-Jumua:10)<sup>40</sup>

## 2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposit merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.<sup>41</sup> Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka kedalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthalaqah*. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*,

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2005) hlm. 554

<sup>41</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) Hlm. 95

deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

### 3. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan pada bank syariah, khusus nya pada pertama ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat kesektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi. Bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade fiancing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabaha salam dan istishna*) dan pola sewa (*ijaroh muntahiyah bitamlik*).

#### a. Pembiayaan Modal Kerja

##### 1) Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudrabah* atau *musyarakah*.

##### 2) Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha seperti perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabbahah*. Dengan berjual beli,

kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.

b. Pembiayaan Investasi

1) Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau musyarakah sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya.

2) Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagainya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

3) Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara bagi hasil atau kepemilikan karena resikonya terlalu tinggi dan kebutuhan



modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti ini dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiyah bitamlik*. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal dan sejenisnya. Selain itu pembiayaan *ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.

c. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

a) Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah apartemen dan sebagainya.

b) Jual Beli

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian dengan menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung resiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

c) Sewa

Dengan akad ini bank syariah memberikan aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati diawal diakad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan pada sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

#### 4. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujrah*) atau fee.

### C. Hukum Islam Tentang Ujrah, Muamalah dan Riba

#### 1. Ujrah

Dalam bahasa Arab *ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini

termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang mana disebut juga *ujrah*.<sup>42</sup>

Menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>43</sup>

*Ijarah* pada hakikatnya termasuk akad jual beli. Perbedaannya dengan jual beli adalah bahwa obyek akad (yang dibeli) dalam akad *ijarah* tidak berupa barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa). 'Iwadh (imbalan) atas manfaat itu disebut *ujrah*, yang menjual disebut *mu'jir/ajir*, dan yang membeli disebut *musta'jir*.<sup>44</sup>

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>45</sup>

Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dalam I'lam Al-Muwaqi'in bahwa manfaat sebagai asal *ijarah/ujrah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah asal *fasiq*

<sup>42</sup>Hendi suhend, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.114

<sup>43</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 187

<sup>44</sup>Darwis Anatami "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam", (Jurnal Al Adalah : Vol.XIII, No.2, Desember 2016) h. 207

<sup>45</sup>Departemen pendidikan nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (jakarta:PT Gramedia, 2011), h. 1108

(rusak) sebab, tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran, As-Sunah, ijma' maupun qiyas yang shahih. Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada. Sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit tetapi asalnya tetap ada.<sup>46</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh pendapat Ibnu Qayyim diatas, jelas bahwa praktek BRILink adalah suatu akad *ijarah/ujrah*, karena transaksi tersebut adalah suatu kegiatan transaksi tarik tunai yang memanfaatkan mesin EDC sebagai alatnya.

Christian Gronross menyatakan bahwa jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *ingtangible* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber fisik atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.<sup>47</sup>

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :” Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

---

<sup>46</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001) h.124

<sup>47</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media:2015) h. 217

menurut suatu perjanjian kerja dan/jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).<sup>48</sup>

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewa barang atau jasa kepada penyewa.

Didalam pelaksanaannya aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam arti “aset yang telah dimiliki oleh bank” bukan berarti bank harus sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan barang

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

<sup>49</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) Hlm. 124



itu secara yuridis berada ditangan bank, yaitu setelah kepemilikan itu beralih dari pemasok kepada bank.<sup>50</sup>

Para jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karenanya, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, airnya, dan lain-lain, sebab itu semua bukan manfaatnya melainkan bendanya.<sup>51</sup>

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>52</sup>

Kata *ijarah* dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

---

<sup>50</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group:2014) hlm.264

<sup>51</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia:2001) hlm.12

<sup>52</sup>Departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (jakarta: PT Gramedia, 2011), h

<sup>53</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media:2015) hlm.234

uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Upah menurut para ahli

- a. Nurimansyah Haribuan berpendapat bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>54</sup>
- b. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan upah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>55</sup>

#### a. Dasar Hukum *Ujrah*

##### 1. Hukum *ujrah* menurut Al-Quran

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian *Ujrah*. Diantara nya Q.S Al-Imran ayat 57

---

<sup>54</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 68

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 114

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ  
 أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai prang yang dzolim”(Q.S Ali-Imran:57)<sup>56</sup>

Maksud dari ayat tersebut menerangkan bahwa di dunia mereka akan mendapatkan pahala terhadap amalan mereka, baik dengan dimuliakan, ditolong dan mendapatkan kehidupan yang bahagi, hanya saja pahala secara sempurna akan diberikan pada hari kiamat, dimana mereka akan mendapatkan kebaikan yang mereka kerjakan semuanya ada dihadapan, lalu diberikan balasannya dan diberikan tambahan oleh Allah dari karunia dan kepemurahan-Nya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Q.S Al-Thalaq:6)<sup>57</sup>

Maksud dari ayat tersebut diatas yakni bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 57

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h

untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan sang bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳ ﴾



*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang*

*tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah:233)<sup>58</sup>*

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa jika ingin menyewa jasa seorang pekerja, maka sebagai penyewa harus bertanggung jawab atas upahnya. Upah yang dibayarkan secara patut dan tidak merugikan bagi pekerja.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qhashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ <sup>ط</sup> إِنْ خَيْرٌ مِّنْ  
اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qhashas:26)<sup>59</sup>*

Berdasarkan dalil diatas menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan kepada tamunya dengan memberi upah kepadanya.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 37

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 388



Pekerjaan yang diupah kepadanya yakni mengembalikan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya.

## 2. Hukum Ujrah menurut As-Sunah

Terdapat juga As-Sunah yang berkaitan dengan perjanjian Ujrah.<sup>60</sup>

Dari Ibn Umar Radhiyallahu An Huma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Beikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

(H.R Ibnu majah dari Ibn Umar)<sup>61</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran itu sangat dihindari oleh Nabi SAW.

مَنْ سَتَأَجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

<sup>60</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001) h.124

<sup>61</sup>Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani ) cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani: 1995) h. 361

Artinya : “*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh beritahukanlah upahnya*” (H.R Abd Razaq dari Abu Hurairah)<sup>62</sup>

### 3. Hukum ujarah menurut ijma’

Para sahabat pada masa sepeninggal nabi Muhammad SAW telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan oleh sayyid sabiq :”Dan atas diisyaratkan sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat yang berbeda dengan ijma’ para ulama ini”. Karena Al-Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>63</sup>

Dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Ibid, h. 360

<sup>63</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006) hlm.18

<sup>64</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2* (semarang: Muktabah Usaha Keluarga), hlm.165

Al-ijarah merupakan “Akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.

#### 4. Hukum upah menurut Undang-Undang

Upah merupakan hak normative buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menerangkan : “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjaan jasa yang telah atau dilakukan”.<sup>65</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi manusia. ekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dan dilindungi oleh undang-undang. peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Sebagaimana uraian diatas maka tidak ada lagi keraguan dalam kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja /buruh

#### **b. Syarat Ujrah**

Yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa yaitu sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri. Sistem pengupahan disyaratkan harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. Adapun syarat-syarat ujrah adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

##### **1) Pelaku ijarah harus berakal**

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafiiyah dan hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil

---

<sup>66</sup>Ghufran A. Mas'adi , *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002) h. 186

dan orang gila menyewa harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka al-ijarah tidak sah.

Dalam hal ini para ulama berpendapat kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditenrukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, hingga segala sesuatu yang dilakukan dapat dipandang sesuatu yang sah.

## 2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam berakad ijarah. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa:29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.* (Q.S. An-Nisa (5)29)<sup>67</sup>

## 3) Objek Al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek Al-ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 83

sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek Al-ijarah suatu yang dihalalkan oleh syara’

Islam telah membenarkan terjadinya sewa menyewa. Tetapi ada pula sewa menyewa yang dilarang oleh islam, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan “sewa menyewa dalam masalah maksiat, tidak boleh”.

5) Objek Al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena tidak jelas menghalangi penyerahan dan penerima sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-sunah adalah pengupahan para musta’jir harus memberi upah kepada mu’ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.



Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan.

### c. Rukun Ujrah/Ijarah<sup>68</sup>

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari :

- 1) *Sigah ijarah*, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah yaitu :
  - a. Manfaat barang dan sewa
  - b. Manfaat jasa dan upah

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)

---

<sup>68</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2016) hlm. 105

<sup>69</sup>Ibid, hlm.110

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa.



Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat juga dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

- h. Pembayaran sewa atau upah boleh terbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

#### **d. Macam-Macam Upah (Ijarah)**

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat bedakan menjadi dua, yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* 1, (Jakarta: Gema Insani Press:2002) hlm.67

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

**e. Prinsip dan Pelaksanaan *Ijarah***

1) Prinsip *Ijarah*

Sebuah transaksi *ijarah* dilandaskan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa/pelayanan.

2) Pelaksanaan *Ijarah*

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa untuk terlaksananya sewa-menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu harus ada pihak yang menyewakan dan pihak

penyewa, ada barang atau manfaat yang disewakan dan ongkos sewanya serta harus ada ikrar ijab dan qabul.<sup>71</sup>

#### f. Sistem Pengupahan dalam Islam

Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syariah, bukanlah sesuatu yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentranformasikan konsep pengupahan yang adil dalam dunia kerja.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal kerja,

sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl (16):97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami ber balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”(Q.S An-Nahl:97)<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1997), hlm. 156

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 278

Pemikiran Ekonomi Islam yang berkaitan dengan kesehatan moral dan fisik adalah salah satu kriteria pemilihan tenaga kerja. Yang diabadakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qhasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ <sup>ع</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku sebagai orang yang bekerja (pada kita), karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S Al-Qhasas:26)<sup>73</sup>

Menurut Afzalur Rahman ayat ini menjelaskan bahwa kekuatan fisik (*al-qawl*) dan kejujuran (*al-amin*) sebagai kekuatan moral diperlukan oleh seorang pekerja yang cakap. Sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa dan justru karena hal ini beliau dicontohkan sebagai pekerja. Baik bagi buruh kasar maupun tenaga kerja ahli kejujuran adalah suatu unsur yang paling penting dalam bekerja. Begitupun tak terkecuali bagi pekerja agent BRILink.

Menurut Al-Maliki hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Al-Maliki menegaskan “Tansaksi jual beli itu

---

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 388

berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitupun juga, pengontrakan manfaat tenaga berdasarkan kerelaan antara *ajir* dan *musta'jir*.

## 2. Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata '*aamala, yu-'amilu, mu'amalatan*', artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.<sup>74</sup>

Kata mumalah berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologis dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam redaksi lain disebutkan muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>75</sup>

Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi, berikut beberapa devinisi fiqh muamalah menurut para ulama dan ahli :<sup>76</sup>

### a. Menurut Ad-Dimyati

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) h. 1

<sup>75</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group:2015) h.2

<sup>76</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001)h.14



Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi

b. Menurut Muhammad Yusuf Musa

Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia

c. Menurut Hudhari Beik

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat

d. Menurut Idris Ahmad

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

**a. Prinsip-Prinsip Muamalah**

Ada beberapa prinsip muamalah yaitu sebagai berikut :<sup>77</sup>

1. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Firman Allah SWT Q.S Al-Hadiid ayat 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ

“.. dan Dia selalu bersamamu dimana pun kamu berada” (Q.S

*Al-Hadiid:4*)<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia: 2013) hlm. 7

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 538

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah seharusnya bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah dan sesuai tuntunan syariah.

## 2. Prinsip Halal

Umat Islam dalam mencari rezeki diharapkan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram . melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi dan dalam memanfaatkannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridho Allah SWT.

## 3. Pinsip *Mashlahah*

*Mashlahah* adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara dan akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi yang seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak

dan tidak membawa *mashlahah* pada umat islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

#### 4. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditentukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah syara' yang perlu diperhatikan :

- a. Senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya
- b. Mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemashlahatan pribadi dan kemashlahatan masyarakat.

#### 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip ini harus didasari prinsip suka sama suka (*an tradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang didzolimi dengan didasari akad-akad yang sah. Transaksi yang dimaksud tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

#### 6. Prinsip Kerja Sama (*Corporation*)

Didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

#### 7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplemantasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

#### 8. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara parapihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

#### 9. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

#### b. Dasar Hukum Muamalah

Muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberikan ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoritisi hukum islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqh muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.<sup>79</sup>

Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanaya prinsip ini Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya

---

<sup>79</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2016)h, 8

untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.<sup>80</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ  
فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :”maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah: 279)<sup>81</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

### 3. Riba

Menurut etimologi riba adalah *Aziyyadah* yaitu tambahan<sup>82</sup>.

seperti arti riba pada ayat :

...فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبَتَتْ...

Artinya : “kemudian apabila kami turunkan air diatasnya,

hiduplah bumi dan suburlah” (Q.S Al-Hajj:5)<sup>83</sup>

<sup>80</sup>Ibid, hlm, 8

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 47

<sup>82</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.57

Dalam pengertian lain, secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok dan modal secara batil. Menurut beberapa pendapat para ulama Riba adalah :<sup>84</sup>

a. A. Hassan

Berpendapat bahwa riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam.

b. Syabirin Harahap

Menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan.

c. Shaleh Ibn Fauzan

Berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam tranaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Bukanlah sistem pembunga-an uang (rente stelsel) yang merupakan riba itu dilarang didalam Islam sendiri diantara agama-agama yang diturunkan dari langit (samawi), tetapi didalam kedua agamayang terdahulu dari Islam larangan itutelah dinyatakan dengan tegas. Jadi ia dilarang dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, bukan hanya didalam Al-Quran saja.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 322

<sup>84</sup>Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group: 2015) h. 181

<sup>85</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba* (Teluk Betung: Zaid Suhaili: 1976) h.12



Riba dilarang Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Tahap kedua, pada awal periode madinah praktek riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW., Allah SWT menegaskan perdebadaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, dan menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.<sup>86</sup>

#### **a. Macam-Macam Riba**

Jumhur Ulama membagi Riba dalam dua bagian, yaitu:

##### **a) Riba *Fadhl***

Riba *Fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda

---

<sup>86</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada: 2015) h. 13

tersebut.<sup>87</sup> Riba *Fadhl* juga sering disebut riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.<sup>88</sup> Dalam perbankan riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

#### b) Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* itu ialah riba yang terdapat nash akan larangannya didalam Al-Qur'anul Karim, yaitu: Bahwa orang yang berhutang memberi tambahan pada utangnya sebagai imbalan dari penundaan pembayarannya. Jadi, ia adalah suatu tambahan yang disebabkan oleh "*nasiah*" yaitu penundaan pembayaran.<sup>89</sup> *Nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa ada biaya. Padahal dalam

<sup>87</sup> Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001) h.262

<sup>88</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2011) h.37

<sup>89</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba* (Teluk Betung: Zaid Suhaili: 1976) h.35

bisnis selalu ada untung dan rugi. Itulah yang terjadi dalam riba *nasiah* yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi (*certain*).<sup>90</sup>

Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah, riba nasi'ah adalah riba tambahan atas salah satu barang yang diutang, seperti orang yang berhutang sekati kurma dimusim dingin dibayar kembali satu setengahnya dimusim panas.<sup>91</sup>

## b. Dasar Hukum Riba

Riba diharamkan dalam Al-Quran, Sunah dan Ijma'. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكَم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu;

<sup>90</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2011) h.

<sup>91</sup> Idri, *Hadist ekonomi*, ( Jakarta: Prenamedia Group: 2015) h.194

*kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)”.(Q.S Al-Baqarah:278-279)<sup>92</sup>*

Riba dalam Al-Quran dilihat dari segi *munasabah*-nya menunjukkan beberapa karakter berikut. Pertama, riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat dibedakan antara yang baik dan yang buruk,seperi tidak dapat dibedakan jual beli yang jelas dan halal.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ  
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ

Artinya :”*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(Q.S Ar-Rum:39)<sup>93</sup>*

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa nash itu menunjukkan bahwa Allah SWT. Mencerca riba dan memuji zakat dan kebajikan. Ini mengandung arti larangan,meskipun tidak dengan cara secara tegas dan positif. Dari itu jelaslah, bahwa islam tidak berdiam diri dari menyatakan dengan suara yang lantang, bahwa riba dipandang tidak alamiah pada periode manapun dari periode-periode Dakwah Islamiah, hingga ketika Nabi SAW berada di Mekkah

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 47

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 408

sekalipun, beliau menguraikan hukum-hukum Islam secara terperinci.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan"* (Q.S Ali-Imran:130)<sup>94</sup>

Ayat diatas turun pada tahun ketiga hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau bunga kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat tersebut menjelaskan tentang ketercelaan riba tersebut serta didalamnya terdapat kezhaliman yang dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>95</sup>

<sup>94</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 66

<sup>95</sup>Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group: 2015) h. 185

Azab riba selain diakhirat juga didunia, seperti hadis nabi berikut :

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya “Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah azza wa jalla” (Ahmad, Musnad Ibn Mas’ud).<sup>96</sup>

Selain diriwayatkan oleh ahmad, hadist tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Ya’la. Al-Haitsami mengatakan bahwa riwayat abu ya’la tersebut sanadnya sangat baik.

#### **D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)**

##### **1. Dasar Hukum OJK**

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang

---

<sup>96</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani ) cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani: 1995) h. 293



dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.<sup>97</sup>

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga tersebut meaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.<sup>98</sup>

Dalam *Official website www.ojk.go.id* disebutkan bahwa Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan indrustri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi OJK adalah :

- 1) mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektorjasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntable;
- 2) mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>99</sup>

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu

---

<sup>97</sup>Penjelasan paragraf 10 Undan-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>98</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) hlm. 280

<sup>99</sup><http://www.ojk.go.id>

meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia pengelolaan pengendalian dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan OJK mempunyai wewenang :<sup>100</sup>

1. Pengaturan dan pengawasan diperbankan meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.

Mendasarkan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.<sup>101</sup> Maka dibentuklah lembaga OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>100</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>101</sup>Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam hal ini Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga OJK.

## 2. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014

Lembaga Jasa Keuangan dapat menyediakan produk-produk dan berbagai macam layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan produk-produk yang dapat disediakan Lembaga Jasa Keuangan Laku Pandai, antara lain:<sup>102</sup>

### a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud adalah tipe tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan
- 2) Dalam mata uang rupiah
- 3) Setiap melakukan transaksi debet rekening berupa penarikan tunai , pemindahan buku dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

---

<sup>102</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), h.4

- 4) Batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun secara kumulatif dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank
  - 5) Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulanan, pembukuan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening
  - 6) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
  - 7) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah)
  - 8) Dan lain sebagainya
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, karakteristiknya sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun
  - 2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur

- 3) Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit 70% dari total portopolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai

- c. Asuransi mikro, ialah produk asuransi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### **3. Kegiatan Layanan Oleh Agen**

Dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai, kegiatan layanan yang dapat dilakukan agen terhadap nasabah atau calon nasabah harus sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu antara lain :<sup>103</sup>

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening

---

<sup>103</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), h.11

- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana
- d. Transaksi terkait jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku

Agen pelaksana Laku Pandai hanya dapat melayani nasabah atau calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencapai desa atau setara desa lain disekitarnya. Penetapan wilayah yang dimaksud harus disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, atau lokasi topologi wilayah.

Sebagai agen Laku Pandai, mereka pun dapat memasarkan produk atau layanan jasa keuangan lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan layanan keuangan yang dipasarkan. Selain itu, juga memberitahukan kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan agen. Namun agen juga dituntut untuk tetap bisa memberikan layanan yang baik kepada nasabah,

terutama kepada nasabah yang terlebih dahulu bekerjasama dengan agen.

#### 4. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:<sup>104</sup>

##### 1. Hak dan kewajiban Bank penyelenggara dan Agen

##### a. Hak Bank Penyelenggara antara lain:

- 1) Meminta laporan kepada agen
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen

##### b. Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain

- 1) Memberikan imbal jasa kepada agen
- 2) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai
- 3) Melakukan edukasi dan pelatihan

##### c. Hak Agen antara lain

- 1) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan
- 2) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara

##### d. Kewajiban Agen antara lain

---

<sup>104</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah



- 1) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah
  - 2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi
  - 3) Mematuhi Ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara
  - 4) Menyampaikan laporan kepada bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.
1. Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain:
- a. Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen
  - b. Jenis *electronic device* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen
  - c. Dan lain sebagainya.

Produk dan layanan pada BRILink dalam perjanjiannya dilakukan dengan akad ijarah atau ujarah yaitu imbal jasa. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir oleh seorang musta'jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal

jasa tersebut adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang sudah dijelaskan pada perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis diatas.

Mekanisme imbal jasanya adalah berupa besaran komisi/fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam islam.



### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bank BRI**

Pada masa sebelum kemerdekaan bank-bank diindonesia masih dalam kuasa negara belanda. Mereka mendirikan bank-bank untuk kepentingan kelompok dan perekonomian mereka sendiri. Di masa saat itu indonesia sangat terpuruk, terlebih dalam dunia usaha. Kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani banyak juga yang hanya menjadi buruh. Bank-bank asing tidak sudi memberikan pinjaman kepada masyarakat indonesia dengan alasan tidak menguntungkan serta pengambilan kredit yang kecil.

Di indonesia bank saat ini merupakan bagian dari sistem ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terutama pada aspek permodalan. Dalam hal ini artinya seseorang bisa saja melibatkan dengan suatu perjanjian secara langsung atau bisa juga melalui pihak ketiga untuk meminjam sejumlah modal/uang untuk mengembangkan sebuah usaha maupun untuk kepentingan keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kegiatan bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali.

##### **1. Lahirnya BRI<sup>105</sup>**

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang telah berjasa membangun indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank

---

<sup>105</sup> <https://bri.co.id>

Rakyat Indonesia di dirikan dipurwekerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Ara Wirjaatmadja dngan nama The Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwekerto” suatu lembaga yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia “Priyai”. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.1 Tahun 1946 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam nasa perang memperahankan kemerdekaan Indonesia, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif lagi setelah terjadinya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural,

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

BRI juga telah menjadi peningkatan kinerja positif diatas rata-rata hingga akhir periode triwulan akhir 2018 dengan penyaluran kredit diatas rata-rata. Lalu BRI juga telah banyak melakukan kegiatan amal seperti mengirimkan bantuan kepada korban gempa dan tsunami disulawesi tengah. Banyak prestasi dari BRI yang bisa dibanggakan sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2018 lalu, BRI merayakan ulang tahunnya yang ke-123 dan meluncurkan produk-produk digital bank terbaru. Produk-produk tersebut pada akhirnya akan memperkuat komitmen BRI untuk masuk sebagai bank digital dan membantu semua transaksi yang berbasis digital. Selain itu BRI Juga sempat mendukung industri infrastruktur nasional dan telah dinobatkan oleh Global Finance sebagai bank terbaik di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. faktor yang menjadi pertimbangan Global

Finance untuk penilaian diantaranya aset, laba, layanan perbankan, inovasi, dan pricing yang kompetitif.

## 2. Visi dan Misi BRI

Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :

a. Visi : Menjadi *the best valuable bank di Asia Tenggara* dan *home to the best talent*

b. Misi :

1) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2) Menyediakan pelayanan prima

3) Bekerja dengan optimal dan baik

## 3. Nilai Dasar Perusahaan

a. Integrity

Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai integrity adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.

b. Professionalism

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh

tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai professionalism adalah continuous learner dan fairness.

c. Trust

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai trust adalah saling menghargai & mengutamakan kepentingan Perseroan dan Negeri.

d. Innovation

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai innovation adalah visioner dan pionir perubahan.

e. Customer Centric

Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai customer centric adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan collaborative.

4. Sikap Prilaku Insan BRI

- a. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan
- b. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan



- c. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab
- d. Berorientasi ke masa depan
- e. Sebagai panutan dan berjiwa besar
- f. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan
- g. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan
- h. Terampil, ramah, senang melayani
- i. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai
- j. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan

Seluruh informasi mengenai sejarah berdirinya BRI (Bank Rakyat Indonesia) dapat ditemukan pada museum BRI yaitu ditempat asal didirikannya bank ini yaitu Purwokerto, Jawa Tengah. Museum tersebut memiliki koleksi yang cukup unik dan sangat bermanfaat sebagai informasi pembelajaran. Contohnya berupa koleksi uang kertas asing, pakaian dan aksesoris pendiri Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, uang kertas dan logam lama, diorama, uang logam asing, mesin pembukuan dan lainnya.

## **B. Sejarah Terbentuknya BRILink<sup>106</sup>**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini

---

<sup>106</sup> <https://bri.co.id>tentang-brilink>

merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*.

Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless Banking atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor di area tersebut.

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep Sharring fee.

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.

Brilink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan para regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.<sup>107</sup>

### C. Konsep BRILink<sup>108</sup>

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agent, para agen itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50. Jadi, 50 untuk agen dan 50 untuk BRI.

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan fee yaitu 50:50, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Osbal Saragi Rumahorbo (Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia) bersama *swa.co.id* tanggal 16 oktober 2018

<sup>108</sup> <https://bri.co.id>tentang-brilink>

dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
2. Transfer antar bank Rp 6.500,00
3. Setor Pasti Rp 3.000,00
4. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi 50:50 antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah  $3000:2 = 1500$ , dan 1500 itulah yang menjadi bagian sharing fee untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.<sup>109</sup>

Apabila melakukan transaksi transfer menggunakan rekening nasabah maka biaya admin akan terdebit langsung pada rekening nasabah. Seperti menurut penuturan saudari Maryatun selaku nasabah BRILink, ketika beliau melakukan transaksi transfer ke antar Bank senilai Rp 500.000,00 dengan tarif biaya atas jasa yang harus dibayar sebesar Rp 5.000 dan Rp 3.000,00 akan terdebit langsung pada rekening nasabah jadi total biaya

---

<sup>109</sup> Fitriyani, wawancara, Agen BRILink dusun 1 desa Sidorahayu, kecamatan abung semuli, lampung utara, tanggal 12 april 2019

yang sebenarnya dikeluarkan adalah Rp 8.000,00 saudara Maryatun mengakui sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut<sup>110</sup>. Sebagian besar nasabah mengira hanya Rp 5.000,00 lah biaya yang harus dikeluarkan, biaya Rp 3.000,00 yang terdebit dari rekening nasabah inilah yang perlu diinformasikan agen kepada para nasabah.

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK Laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Dan supaya masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada

---

<sup>110</sup> Maryatun, wawancara, Nasabah BRILink dusun IV desa Sidorahayu, kecamatan bung semuli, lampung utara, tanggal 7 maret 2019

nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.<sup>111</sup>

## 1. Produk dan Layanan Agen BRILink

- a. Laku Pandai menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk unbanked/unserved people dalam rangka keuangan inklusif.
- b. T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.

---

<sup>111</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum



- c. MiniATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

## 2. Fitur dan Fasilitas BRILink

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa produk dari BRILink dan berikut adalah fitur-fitur dan beberapa fasilitas yang disediakan oleh BRILink.

### a. TBank

- 1) *Cash In*
- 2) *Cash Out*
- 3) *Report*

### b. Tunai

- 1) *Setoran pinjaman*
- 2) *Setoran simpanan*
- 3) *Tarik tunai*

### c. Mini ATM

- 1) *Registrasi*
  - a) Mobile banking
  - b) Internet banking
- 2) *Informasi*
  - a) Saldo rekening
  - b) Mini statement
  - c) Mutasi rekening



### 3) *Transfer*

- a) Sesama BRI
- b) Antara BRI
- c) Kode Bank

### 4) *Pembayaran*

- a) Telkom
- b) Pasca bayar : Halo, Matrik
- c) PLN : PLN Prabayar, Pasca Bayar, Cetak Token
- d) Telepon Rumah
- e) Kartu kredit : BRI, Citybank, HSBC, Standart Chartered, ANZ,
- f) Cicilan : FIF, BAF, OTO, WOM, Finansia/K. Plus, Verena
- g) Zakat : Dompot Dhuafa, YMB
- h) Infaq : Dompot Dhuafa, YMB
- i) DPLK BRI
- j) Tiket Pesawat : Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air
- k) BRIVA
- l) Pendidikan

### 5) *Isi Ulang Pulsa*

- a) Telkomsel
- b) Indosat
- c) XL
- d) Three

e) Smartfren

f) Esia

6) *Setor Pasti*

3. Persyaratan Agen Laku Pandai<sup>112</sup>

Agent perorangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggara laku pandai
- b. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik
- c. Memiliki sumber penghasilan utamayang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara yang kegiatan usahanya sejenis
- e. Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyelenggara.

4. Persyaratan Agen BRILink<sup>113</sup>

a. Identitas

Fotokopi Dokumen Identitas Pemilik: KTP pemilik/pengurus atau NPWP pemilik (untuk badan usaha)

b. Dokumen Usaha

Fotocopy Dokumen Legalitas Usaha: Surat Keterangan Usaha Minimal dari RT/RW, atau SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha),

---

<sup>112</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasam Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai

<sup>113</sup> <https://bri.co.id>tentang-brilink>

akte pendirian (untuk agen berbadan usaha berbadan hukum), Izin usaha lainnya.

c. Rekening Tabungan

Fotocopy bukti kepemilikan rekening: Buku Tabungan/ Rekening Koran.

d. Dokumen Pengajuan

Dokumen pengajuan agen BRILink : Formulir pengajuan Agent BRILink Perjanjian Kerjasama BRILink.

Berikut daftar informasi yang perlu di informasikan agen kepada nasabah yang bersikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah.

Antara lain:

Yang harus dilakukan ( <i>Do's</i> )	Yang tidak boleh dilakukan ( <i>Don'ts</i> )
Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap melakukan transaksi di agen	Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada agen
Nasabah memperhatikan batas maksimum transaksi penarikan tunai, memindahbukukan dan/atau transfer keluar yang dapat dilakukan dalam 1 bulan	Nasabah tidak boleh memberikan nomor identitas pesonal (PIN) dan/atau kata sandi ( <i>password</i> ) kepada pihak lain termasuk agen
Nasabah mengecek informasi	Nasabah tidak boleh membayar

pribadi yang dinput agen pada saat pembukuan rekening	biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait
Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi	Nasabah tidak boleh menitipkan uang diagen dalam hal terjadi masalah pada sistem di agen dan/atau Bank Penyelenggara.
Nasabah mengingat nomor pengaduan ( <i>call center</i> ) Bank Penyelenggara	-
Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan agen laku pandai	-

(sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015)

#### 5. Keunggulan Agen BRILink

- a. Tanpa modal alat
- b. Bebas biaya sewa bulanan alat
- c. Dapat melayani pembukuan rekening tabunganku Basic Saving Account (BSA) , T- bank, transfer sesama BRI dan antar bank serta fitur transaksi lainnya.
- d. Fee yang diberikan kompetitif

## **D. BRILink di Desa Sido Rahayu**

### **1. Profil Desa Sido Rahayu**

Desa sidorahayu adalah desa pemekaran dari desa Blambangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan mekar pada tahun 1993, dahulunya merupakan dusun Campang Tritunggal yang berinduk di desa blambangan, maka sejak itulah desa mekar menjadi desa persiapan Sido Rahayu yang dipimpin oleh kepala desa Sdr H. Asmuni Basri.

Desa Sido Rahayu adalah sebagian besar penduduknya mata penupaten Lampungaharian sebagai petani dan buruh PT Humas Jaya dan Godam Jaya (BW), dan merupakan desa paling ujung berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah desa Banjar Kertahayu kecamatan Way Pengubuan, dan sebagian besar penduduk mayoritas penduduk jawa, sunda dan 20 % suku lampung.

Desa Sido Rahayu memiliki luas wilayah 2511 ha dengan lahan 1511 ha masuk area Humas Jaya dan 1000 ha wilayah yang dimukim masyarakat serta peladangan, sawah dan perkebunan. Letak desa Sido Rahayu berada disebelah barat desa yang merupakan Ibukota Lampung Utara. Sido Rahayu berada pada sebelah utara PT GGP Humas Jaya, sebelah timur Kampung Banjar Kertahayu, Way Pengubuan, sebelah selatan Desa Blambangan Pagar, sebelah barat Desa Blambangan Pagar dan Desa Papan Asri.

Kondisi perekonomian Sido Rahayu dapat dikategorikan dalam kelas menengah kebawah. Terbukti dengan adanya 411 KK dikategorikan miskin. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomi desa yang menonjol adalah pertanian.

Tabel Mata Pencaharian Desa Sido Rahayu<sup>114</sup>

NO.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	726	710
2	Buruh Tani	1572	1416
3	Pegawai Negeri Sipil	36	33
4	Pedangang Keliling	2	3
5	Peternak	-	-
6	Nelayan	-	-
7	Dokter Swasta	-	-
8	Bidan Swasta	-	4
9	Perawat Kepala Pustu	1	-
10	TNI	4	-
11	POLRI	-	-
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12	-
13	Pengusaha kecil dan menengah	-	-

<sup>114</sup> Data umum Desa Sidorahayu



14	Pengusaha Besar	-	-
15	Karyawan Perusahaan Swasta	12	30
16	Belum Bekerja	-	-
17	Tidak Bekerja	-	-
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>2465</b>	<b>2206</b>

## 2. BRILink di Desa Sido Rahayu

Sehubungan dengan kondisi perekonomian desa Sido Raayu yang mayoritas sebagian sumber penghasilan penduduk masyarakat disana adalah petani dan buruh. Para petani bertani untuk ladang mereka sendiri dan ada pula yang menyewa lahan milik orang lain. Dan para buruh mayoritas bekerja pada PT GGP Humas Jaya mulai dari remaja, bapak-bapak hingga ibu-ibu rumah tangga.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan mudah, PT GGP Humas Jaya tak mau ketinggalan perkembangan zaman. Terkhusus dalam sistem pengupahan para karyawannya. Dahulu PT GGP Humas Jaya masih menggunakan sistem upah langsung, yaitu sistem yang memberikan upah/gaji berupa uang tunai secara langsung untuk diberikan kepada karyawan-karyawannya. Dan sebenarnya itu cukup menyita banyak waktu, mengingat ada ribuan karyawan yang harus diberi upah. Namun sekarang jauh lebih mudah, karena sekarang para karyawan masing-masing diberikan kartu ATM, yang nantinya gaji para karyawan akan otomatis tertransfer ke ATM masing-masing

karyawan. Hal inilah yang mendorong beberapa pembisnis didesa Sido Rahayu berminat untuk membuka usaha BRILink dan menjadi agen BRILink.

BRILink pertama didesa Sido Rahayu adalah BRILik milik saudara Ilal Khoirul Anam yaitu pada tahun 2015, kemudian menyusul BRILink-BRILink lain. Terhitung jumlah BRILink didesa Sido Rahayu sejak tahun 2015 hingga sekarang ada 6 BRILink yang beroperasi dimasing-masing dusun.

Para agen BRILink di desa sidorahayu tidak mematok tarif khusus, mereka masing-masing memasang tarif sendiri. Jadi, antara agen A dengan agen B belum tentu memiliki tarif biaya yang sama. Setelah melakukan survey beberapa nasabah pengguna BRILink Desa Sidorahayu, pada Agen Ilal pada dusun IV memasang tarif pertransaksi transfer tunai adalah RP 5.000,00 jika nominal RP 100.000,00- RP 500.000,00, namun pada agen Fitriyani memasang tarif RP 7.000,00 pada transaksi yang sama. Dan begitupun pada BRILink antar Kecamatan. Berdasarkan survey beberapa nasabah pengguna BRILink di Kecamatan Abung Semuli bahwa agen memasang upah biaya transfer RP 15.000,00 sedangkan di BRILink Kecamatan Way Pengubuan bahwa agen BRILink memasang upah biaya tarik tunai RP 18.000,00 upah biaya belum ditambah biaya tansfer dan lainnya.

Ada banyak produk layanan yang ditawarkan oleh BRILink, dan semakin banyak produk layanan tersebut semakin banyak pula macam-

macam transaksi yang dilakukan. Seperti transaksi transfer tunai, jika nasabah memiliki kartu ATM sendiri maka nasabah bisa melakukan transaksi tersebut menggunakan ATM pribadi. Tetapi jika nasabah tidak memiliki kartu ATM pribadi maka nasabah bisa menggunakan kartu ATM agen, yang nantinya akan ditransferkan melalui rekening agen. Berbeda jika nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai, nasabah harus menggunakan ATM pribadi dan tidak bisa menggunakan ATM agen.



## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DATA**

#### **A. Penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah**

Berdasarkan penjabaran sub bab sebelumnya yang terkait dengan praktek penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink di desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara. Penulis berusaha menganalisis secara rasionalistik pada masalah ini sehingga mudah dipahami.

BRILink merupakan salah satu layanan perbankan tanpa kantor yang tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Yang merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRILink. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink bermacam-macam salah satunya adalah sistem transfer tunai, mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI.

#### **B. Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa yang diberikan Bank BRI Terhadap Agen BRILink**

Islam adalah salah satu agama yang detail, mulai dari tatacara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu bentuk tolong menolong antar sesama yaitu bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia adalah harus sesuai dengan hukum syara'

yang telah ditentukan. Sama halnya dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (ujrah). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat adalah upah jasa. Upah juga bisa disebut kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan.

Produk-produk jasa perbankan seperti BRILink dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebankan biaya administrasi.

### **C. Penetapan tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah**

Pada masa kini dimana transaksi keuangan semakin kompleks, Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa. Produk dan layanan BRILink dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan jasa perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, bayar tagihan BPJS, bayar tagihan PLN, beli token PLN, beli pulsa dan lain sebagainya.

Upah mengupah jasa pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pada prakteknya jasa layanan BRILink memang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat desa Sido Rahayu, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai buruh di PT GGP Humas Jaya.

Setelah menganalisa lebih jauh, penulis menemukan suatu kesenjangan antara teori dan praktek pada beberapa agen BRILink. Dalam teori dan praktek yang terjadi bahwa upah mengubah yang dilakukan beberapa agen BRILink didesa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara akadnya kurang jelas dan dasar suka sama suka tetapi karena keterpaksaan tuntutan kebutuhan. Dalam penjelasannya syarat ijarah ada lima yaitu:

1. Pelaku ijarah harus berakal
2. Keridhan pihak yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannnya dalam berakad ijarah. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah.
3. Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat
4. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
5. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Sedangkan dalam praktiknya upah yang ditetapkan agen terhadap nasabah ini termasuk Al- Ikrah (keterpaksaan), karena pada dasarnya tidak ada keterbukaan yang jelas tentang penetapan tarif biaya dalam layanan BRILink. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 sudah dijelaskan yaitu tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Nasabah, yaitu Bank Penyelenggara atau Agen harus melaksanakan edukasi kepada nasabah/masyarakat antara lain mengenai manfaat, risiko

dan biaya produk laku pandai. Pelaksanaan edukasi yang dimaksud adalah dengan memberi penjelasan atau informasi secara lisan kepada nasabah atau calon nasabah yang didukung dengan penyediaan modul edukasi berupa booklet, leaflet atau brosur. Juga informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain berupa:

1. Daftar cakupan layanan yang disediakan oleh agen atau kantor bank penyelenggara dan biaya terkait untuk masing-masing layanannya.
2. Ringkasan informasi mengenai produk/atau layanan yang paling sedikit memuat manfaat, risiko dan biaya serta syarat dan ketentuan
3. Informasi yang berisikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah yaitu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan (do's and don'ts).

Informasi-informasi tersebut dimuat dalam bentuk tertulis antara lain poster, *leaflet* dan/atau brosur yang mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah atau calon nasabah pada saat datang ke lokasi agen.

Dalam akad kerjasama yang dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*'adamul istighlal*).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

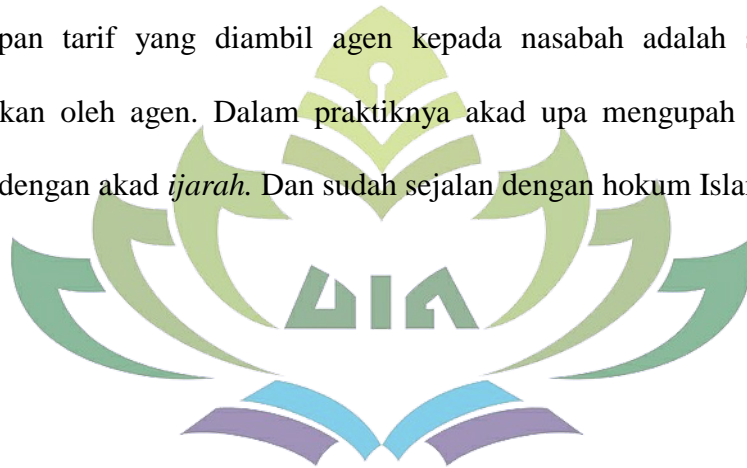
#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Serta menganalisa data-data yang diperoleh sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRI, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut *sharing fee*. Konsep *sharing fee* ini seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Biaya admin dari sistem *sharing fee* tersebut terdapat dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transaksi ke bank lain menggunakan rekening nasabah.

Jasa yang diberikan agen kepada nasabah adalah jasa-jasa layanan keuangan tunai dan non tunai, alat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut adalah mesin EDC, mesin tersebut mampu melakukan transaksi sebagaimana transaksi non tunai yang disediakan di ATM.

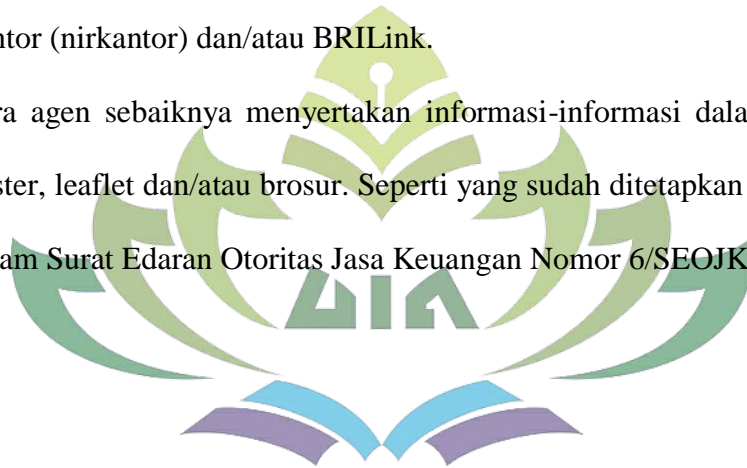
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRI terhadap agen BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (ijarah/ujrah). Ada timbal balik jasa dan besaran fee yang diberikan Bank BRI kepada agen, begitupun agen kepada Bank BRI. Akad ijarah adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir (Bank BRI) kepada seorang musta'jir (agen BRILink) dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti upah (komisi/fee). Didalam hukum Islam hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi ijarah/ujrah.
3. Penetapan tarif yang diambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen. Dalam praktiknya akad upa mengupah ini sudah sesuai dengan akad *ijarah*. Dan sudah sejalan dengan hukum Islam.



## B. Saran

Setelah penjelasan dan uraian diatas penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bank Penyelenggara Laku Pandai hendaknya lebih meningkatkan perhatian kepada para Agen yang berada di daerah-daerah pelosok di indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan keuangan inklusif yang baik dan adil.
2. Para Agen sebaiknya melakukan edukasi kepada para nasabah dan calon nasabah sebelum membuka usaha layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor) dan/atau BRILink.
3. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . IAIN Raden Intan, Lampung, 2015
- Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*, jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Alaiddin Kato. *Filsafat Hukum Islam*, jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani ) cet 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: Raja Grafindo, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surat Al-Maidah), Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surat Az-Zukhruf), , Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghufran A. Mas'adi , *Fiqh Muamalah Konstektual*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , cet. 1 , jakarta: Bulan Bintang, 2017
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2* , semarang: Muktabah Usaha Keluarga
- Idri, *Hadis Ekonomi*, jakarta: Prenada Media, 2015.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Askara, 1999.

Kaelan , M.S. , *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017

M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Muhammad Abu Zahrah, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk betung Zaid Suhaili, 1976.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , cet. ke-2 , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* , Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Said Aqil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2005.

Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah 13*, jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed.) Cet. 4., Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susiadi AS, *Metodelogi penelitian.*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metode Research* , Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

## **Jurnal**

Darwis Anatami “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”,(Jurnal Al Adalah : Vol.XIII, No.2, Desember 2016.

## **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan

Pasal 3 UU No.12 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

Undan-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Surat Edaran Ototitas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum

## **Sumber on-line**

<https://www.apaarti.com/penetapan.html>. (08 oktober 2018)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif>. (08 oktober 2018)

<https://pandusamamaya.wordpress.com/2012/05/08/pengertian-transfer-keuntungan-transaksi-transfer-mekanisme-dan-prosedur-transfer-serta-biaya-transaksi-transfer/> (08 oktober 2018)

<https://rairakamotorsukabumi.wordpress.com/2016/10/11/pengertian-pembayaran-tunai-dan-pembayaran-kredit/> (08 oktober 2018)

<https://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27/apa-itu-brilink-dan-agen-brilink/> (08 agustus 2018)

<http://www.ojk.go.id> (25 januari 2019)

<https://bri.co.id> (8 februari 2019)

<https://bri.co.id>>tentang-brilink (13 maret 2019)

### **Wawancara**

Wawancara dengan Osbal Saragi Rumahorbo (Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia) bersama *swa.co.id* tanggal 16 oktober 2018

Fitriyani, wawancara, Agen BRILink dusun 1 desa Sidorahayu, kecamatan abung semuli, lampung utara, tanggal 12 april 2019

Maryatun, wawancara, Nasabah BRILink dusun IV desa Sidorahayu, kecamatan Abung semuli, lampung utara, tanggal 7 maret 2019

